

# Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT) sebagai Alternatif Strategis Memajukan Usaha Mikro Kecil Sektor Pertanian

Atika R. Masrifah

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

Email: atikamasrifah@yahoo.com

## Abstract

*Micro and Small Enterprises (MSE's) has an important role in economic development in Indonesia. However, MSE's still has a lot of problem. They are still having difficulties to access business financing provided by Islamic financial institutions and banking. This paper attempts to analyze the benefit, opportunity, cost and risk of Islamic financial institutions especially Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) in promoting MSE's utilizing Analytical Network Process (ANP) method with Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR) approach, including the proposed alternative strategies. Results of this study show that the highest priority of cost and risk is the lack of support and the understanding of community. Moreover the highest priority of benefit and opportunity is that Islamic Financial Institutions has a just profit-loss sharing system i.e., taking into account the possibility of profit and loss, and BMT has a wide and deep outreach for the poor and poorest. The priorities of strategic alternative in the agricultural sector to promote SME are providing alternative financing schemes based on sub-activities, establishing Linkage Program between BUS-BPRS-LKA-Government, organizing incentive schemes, and forming a National Agrarian Bank, which will be totally focused on projects in agriculture.*

**Keywords:** MSE's, Islamic Financial Institutions, BMT, ANP-BOCR

## Abstrak

*Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, UMK masih memiliki banyak masalah. Mereka masih kesulitan mengakses pembiayaan usaha yang diberikan oleh lembaga keuangan dan perbankan syariah. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis manfaat, peluang, biaya dan risiko lembaga keuangan syariah khususnya Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) dalam mengembangkan usaha mikro kecil dengan menggunakan metode Analytical*

*Network Process (ANP) dengan pendekatan Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR), termasuk alternatif strategi yang diusulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas tertinggi dari kluster Cost dan Risk adalah kurangnya dukungan dan pemahaman masyarakat. Sementara prioritas tertinggi dari kluster Benefit dan Opportunity adalah BMT menggunakan sistem bagi hasil, yaitu dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, dan luasnya jaringan atau unit layanan BMT. Prioritas strategis yang akan menjadikan BMT sebagai alternatif strategis untuk mempromosikan usaha mikro kecil di sektor pertanian adalah dengan menyediakan skema pembiayaan alternatif berdasarkan sub-kegiatan, membentuk Program Keterkaitan antara BUS-BPRS-LKA-Pemerintahan, mengatur skema insentif, dan pembentukan Bank Pertanian Nasional, yang akan sepenuhnya fokus pada proyek-proyek di bidang pertanian.*

**Kata Kunci:** Usaha Mikro Kecil (UMK), Institusi Keuangan Islam, BMT, ANP-BOCR

## Pendahuluan

Kegiatan perekonomian di Indonesia masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolahan hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Usaha mikro merupakan kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Sektor ini terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat. Tingkat penyerapan tenaga kerja untuk usaha mikro lebih besar dari pada sektor usaha kecil, menengah, dan besar. Hampir 90 persen dari total penyerapan tenaga kerja dikuasai oleh usaha mikro.

**Tabel 1. Kontribusi UMKM terhadap Jumlah Tenaga Kerja dan PDB Indonesia**

Skala Usaha	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)		PDB - Hrg Konstan 2000 (Rp Milyar)	
Mikro	94,957,797 90.77%	99,859,517 90.12%	2,579,388.40 34.73%	2,951,120.60 35.81%
Kecil	3,919,992 3.75%	4,535,970 4.09%	722,012.80 9.72%	798,122.20 9.68%
Menengah	2,844,669 2.72%	3,262,023 2.94%	1,002,170.30 13.49%	1,120,325.30 13.59%
Besar	2,891,224 2.76%	3,150,645 2.81%	3,123,514.60 42.06%	3,372,296.10 40.92%
Total	104,613,682 100%	110,808,155 100%	7,427,086 100%	8,241,864 100%

Sumber: Menegkop & UKM, 2013 ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id))

Usaha mikro dalam memajukan perekonomian nasional juga dapat dilihat dari jumlah usahanya yang mengalami peningkatan signifikan dan lebih besar dari jumlah usaha kecil, menengah dan besar. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia dibandingkan skala usaha lainnya.

Jumlah terbesar dari usaha mikro berasal dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebanyak 26,635,044 unit pada tahun 2011 dan sebanyak 27,063,839 unit pada tahun 2012. Unit usaha mikro terbesar selanjutnya berasal dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, disusul kemudian sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor Industri Pengolahan merupakan unit sektor usaha mikro terbesar urutan ke-empat.

**Tabel 2. Jumlah Unit Usaha Berdasarkan Sektor Ekonomi**

Sektor Usaha	2011	2012
Pertanian, Kchutanan, &	26,635,044	27,063,839
Pertambangan dan penggalian	671,440	681,982
Industri pengolahan	3,588,937	3,689,246
Listrik, gas dan air bersih	423,222	423,304
Konstruksi	897,996	1,022,803
Perdagangan, hotel & restoran	14,800,156	15,596,228
Pengangkutan dan komunikasi	3,598,647	3,872,942
Keuangan dan jasa perusahaan	1,382,629	1,444,075
Jasa-jasa	2,561,894	2,740,173
<b>Jumlah</b>	<b>54,559,969</b>	<b>56,534,592</b>

Sumber: Menekop & UKM, 2013 ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id))

Dengan mengkaji data-data di atas, dapat dilihat bahwa sektor pertanian memberikan peran yang cukup besar dalam perkembangan jumlah usaha mikro yang ada di Indonesia. Sementara pada setiap kegiatan usaha, termasuk buruh tani,

pedagang kecil serta industri rumah tangga, memerlukan modal untuk membiayai kegiatan tersebut. Namun sebagian besar usaha mikro di Indonesia masih sangat lemah dalam memiliki dan mengakses sumber-sumber permodalan formal.

Rendahnya akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal dapat ditunjukkan dengan survei World Bank yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% orang dewasa di Indonesia yang telah bersentuhan dengan lembaga keuangan formal sementara sekitar 49% rumah tangga yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Sedangkan dalam Survei Neraca Rumah Tangga tahun 2011 yang dilakukan Bank Indonesia juga ditemukan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48%. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank masih relatif sangat tinggi yaitu 52%.

Tingkat kemiskinan, lokasi tempat tinggal yang terpencil, atau faktor biaya yang dikeluarkan ketika bertransaksi dengan bank menjadi kendala atau sebab banyaknya masyarakat yang belum mengenal dan menggunakan atau mendapatkan layanan jasa keuangan formal (*unbanked*<sup>1</sup> dan *unbankable people*<sup>2</sup>). Kondisi ini merupakan sebuah pasar yang signifikan untuk menjadi target pasar, karena masyarakat *unbanked* tidak 100% karena *unbankable* dan mereka juga butuh akan pinjaman. Hal ini dapat terlihat dari survey yang dilakukan oleh Ascarya, 94% market memiliki kebutuhan pinjaman, hanya 45% meminjam dari komersial bank. Selain meminjam dari bank, mereka juga meminjam dari BPR/BPRS, teman-teman dan kerabat, pegadaian, dan rentenir.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> *Unbanked people* adalah orang yang belum memanfaatkan jasa keuangan formal (bank) karena alasan seperti kondisi bank yang jauh dari tempat tinggal, biaya yang harus dikeluarkan, pekerjaan yang dijalani, dan alasan lainnya meskipun *bankable*.

<sup>2</sup> *Unbankable people* adalah orang yang tidak layak untuk mendapatkan produk dan layanan keuangan formal (bank) karena pengaruh tingkat ekonomi, sehingga tidak mampu untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan produk dan layanan keuangan formal (bank).

<sup>3</sup> Ascarya, Diana Yumanita, dan Ahmad Arief, 2004, Dominasi Pembiayaan Non-Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia: Masalah dan Alternatif Solusi, PPSK Working Paper Series No: WP/04/02: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta.

Banyaknya masyarakat yang belum bersentuhan dengan lembaga keuangan formal merupakan permasalahan yang perlu dicarikan solusi agar masyarakat memiliki akses ke dalam lembaga keuangan melalui inovasi produk, proses dan saluran distribusi yang tepat. Sehingga manfaat sistem keuangan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam lembaga keuangan diperlukan karena institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka diperlukan kajian komprehensif terkait Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah terutama Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) agar produk dan jasa keuangan syariah bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa sajakah permasalahan baik dari sisi internal BMT maupun permasalahan dari sisi pelaku usaha mikro sektor pertanian dalam memajukan usahanya, dan bagaimana strategi yang harus diterapkan dalam kerangka strategis jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) pendekatan jaringan Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR), beberapa pertanyaan di atas akan dibahas dalam penelitian berikut.

### Peran BMT bagi Usaha Mikro Kecil Sektor Pertanian

Menurut Antonio sistem lembaga keuangan konvensional memiliki aturan main yang berlaku, yaitu (1) Bunga ditentukan di muka dengan asumsi bahwa kegiatan yang didanai harus untung. (2) Persentase keuntungan ditetapkan berdasarkan modal yang dipinjamkan. (3) Pembayaran bunga berlaku tetap tanpa mempertimbangkan alasan apapun. (4) Walaupun keuntungan meningkat, jumlah pembayaran bunga tidak mengalami peningkatan. Penggunaan sistem bunga yang ditetapkan pada awal perjanjian menjadikan sistem ini sangat menghindari pendanaan kegiatan dengan risiko yang sangat tinggi, sehingga pendanaan kegiatan pertanian bukan merupakan sasaran utama optimalisasi perolehan keuntungan. Jika lembaga keuangan mendanai kegiatan pertanian, maka diberlakukan tingkat suku bunga yang sama dengan kegiatan komersial lainnya. Sehingga dalam jangka panjang, pendanaan bagi

sektor ini semakin kecil jumlahnya.<sup>4</sup>

Mencermati peranan sektor pertanian yang sangat strategis dan kondisi mikro yang spesifik, sektor ini memerlukan lembaga penunjang yang spesifik pula. Menurut Arifin (2004: 17) pemulihan perekonomian nasional dapat dilakukan dengan baik bila menetapkan sektor pertanian sebagai sektor pemicu (*the leading sector*) dengan disertai perbaikan operasionalisasi lembaga keuangan sebagai salah satu lembaga penunjang yang sangat penting.

Mengingat kegiatan pertanian sangat dipengaruhi faktor alam yang merupakan faktor yang berada di luar kendali manusia dan output yang dihasilkan memiliki karakteristik khusus yaitu mudah rusak, beragam kuantitas dan kualitas, dan dengan harga yang sangat berfluktuasi, maka menurut Suroso (2004: 42) lembaga keuangan yang dibutuhkan yaitu lembaga keuangan yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu: (1) Menetapkan sistem bagi risiko dan bagi hasil secara adil, yaitu dengan memperhitungkan kemungkinan untung dan rugi. (2) Menghindari penetapan besaran keuntungan di awal perjanjian. (3) Menetapkan bagi hasil berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh.

Lembaga keuangan yang mampu menjawab tantangan ini adalah BMT. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi (Azis, 2008: 2) yaitu *baitul māl* dan *baitut tamwīl*. *Baitul māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit. *Baitul māl* menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. *Baitul māl* juga berfungsi sebagai pendukung adanya kemungkinan terjadinya risiko yang terjadi dalam kegiatan ekonomi para pelaku UM yang menjadi anggota. Sedangkan, *baitut tamwīl* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan taraf ekonomi para pelaku UM. *Baitut tamwīl* juga mendorong kegiatan menabung oleh pengusaha guna menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Lembaga ini pada dasarnya menerapkan konsep berdasarkan perjanjian bagi hasil, yaitu kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko proyek yang dijalankan. Jika untung

---

<sup>4</sup> Antonio, M. Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.

kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan dengan cara pembagian yang disetujui dan jika rugi sama-sama menanggung kerugian. Ashari dan Saptana dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa untuk lebih menjamin rasa keadilan bagi pelaku bisnis pertanian, perlu dibuka wacana model pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian.<sup>5</sup> Beberapa hal yang melandasi prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Karakteristik pembiayaan di LKS sesuai dengan kondisi sektor pertanian. Skim pembiayaan syariah lebih memberikan rasa keadilan karena untung dan rugi dibagi bersama.
- b. Skim pembiayaan syariah sudah dipraktekkan secara luas oleh petani Indonesia. Secara budaya, banyak petani yang sudah mengenal sistem seperti maro (1:2) dan mertelu. Sistem tersebut sejalan dengan prinsip syariah (bagi hasil). Maka dengan sosialisasi yang lebih intensif, petani akan lebih mudah memahami konsep pembiayaan syariah.
- c. Luasnya cakupan usaha bisnis pertanian. Usaha di sektor Pertanian mencakup beberapa subsistem yang sangat luas, mulai dari subsistem pengadaan sarana, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan hingga pemasaran hasil. Pada semua subsistem ini memungkinkan untuk menggunakan pembiayaan model syariah.
- d. Produk pembiayaan syariah cukup beragam. Luasnya cakupan usaha dan komoditas sektor pertanian telah diantisipasi dengan produk pembiayaan syariah yang juga cukup beragam. Hal ini memungkinkan nasabah untuk memilih jenis produk pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi dan karakteristik usaha.
- e. Tingkat kepatuhan petani. Usaha pertanian saat ini masih banyak digeluti oleh sebagian petani kecil di pedesaan, dan umumnya mereka sangat menghormati adat istiadat dan aturan agama dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Komitmen bank syariah untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan oleh BI di akhir tahun 2012, porsi UMKM yang mendapatkan kucuran pembiayaan BUS dan UUS mencapai 72.3%. Hal ini mengindikasikan bahwa bank syariah terbukti lebih fokus pada pembiayaan sektor riil (UMKM).

---

<sup>5</sup> Ashari dan Saptana, 2005. Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 23 No.2. 132-147.

- g. Usaha disektor pertanian merupakan bisnis riil. Hal ini sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah yang menitikberatkan pada pembiayaan sektor riil dan justru melarang pembiayaan yang bersifat spekulatif.

Dari wacana di atas, pertanian *lebih powerfull* untuk menggunakan produk pembiayaan syariah. Dalam skema pembiayaan salam misalnya, petani mendapatkan modal untuk berproduksi sesuai biaya aktual yang dibutuhkan dan mendapatkan keuntungan dengan persentase tertentu. Kewajiban petani berdasarkan skema tersebut adalah menyerahkan produk pertanian dengan kriteria yang telah disepakati kepada pemberi modal (dalam hal ini adalah bank dan/atau pemerintah). Bank dan pemerintah dapat menunjuk suatu lembaga untuk memasarkan produk pertanian tersebut. Berbeda dengan sistem konvensional yang menjadi titik tekannya adalah pengembalian modal (uang) dan bunga. Petani dalam kasus ini hanya mampu menghasilkan setelah panen, inilah yang menjadi titik terang bahwa pembiayaan dengan akad syariah lebih cocok dan *powerfull* dengan kondisi usaha para petani.

*Mançka* dalam paper penelitian yang berjudul *Lending Problems of Agriculture and Agro-Industry in Albania* bahwa ditemukan beberapa akar permasalahan mengenai pembiayaan pada sektor pertanian dan agroindustri sehingga diperlukan tindakan solutif yang harus diambil.<sup>6</sup> Hasil penelitian menjelaskan permasalahan yang dihadapi sektor tersebut adalah sektor pertanian menghadapi berbagai risiko tinggi (cuaca, hama, kandungan gizi dalam produksi), kebanyakan petani tidak memiliki jaminan dalam pembiayaan karena skala usaha pertanian adalah mikro kecil, ketidaksesuaian kondisi dan batas waktu pembayaran pembiayaan sesuai dengan siklus bisnis (khususnya untuk pertanian), bunga yang dikenakan terlalu tinggi serta jauhnya jarak bank dari daerah pedesaan. Lebih lanjut penelitian tersebut menawarkan solusi yaitu pembentukan Bank Pertanian Nasional, dimana bank-bank komersial menawarkan pembiayaan untuk pertanian tetapi suku bunga sangat tinggi, sekitar 24%. Hal ini merupakan pengganti untuk agunan. Bank Pertanian akan terkonsentrasi di sektor tunggal, meminimalkan risiko, akibatnya tingkat bunga akan lebih rendah.

---

<sup>6</sup> Mançka, Dr. Anila. 2012. *Lending Problems of Agriculture and Agro-Industry in Albania*. Ontario International Development Agency. OIDA ISSN 1923-6654. *International Journal Of Sustainable Development* 03:04.



Berbeda dengan di atas, Wulandari (2004) dalam penelitiannya mencoba merumuskan strategi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam memajukan sektor Pertanian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), merumuskan strategi pengembangan berdasarkan faktor eksternal dan internal, serta menentukan prioritas strategi pengembangan bagi LKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan bagi LKS adalah strategi tingkat industri, yaitu dengan meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap ajarannya dan memanfaatkan momentum fatwa majelis ulama tentang bunga bank itu riba. Kemudian strategi tingkat korporasi, yaitu memasukkan sektor Pertanian dalam portofolio pembiayaan secara signifikan, yaitu dengan memperbesar porsi pendanaan bagi sektor Pertanian. Menyediakan berbagai alternatif pola pendanaan yang berdasarkan subsektor kegiatan (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan) dan memberlakukan sistem pendanaan yang memperhatikan jadwal dan tahapan kegiatan Pertanian. Serta strategi operasional, yaitu memperkuat struktur kelembagaan.

Dalam tempat berbeda, Mastur menganalisis penataan kelembagaan dan permodalan bagi pengembangan industri berbasis pertanian.<sup>7</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku industri berbasis pertanian mengalami beberapa kendala dari sisi permodalan, antara lain kompetensi dalam pembiayaan sektor pertanian masih sangat terbatas serta sebagian besar perbankan tidak berani memberikan pembiayaan pada sektor pertanian yang memiliki tingkat risiko usaha tinggi. Selain itu, sesuai dengan hasil penelitiannya, masalah ketergantungan pengusaha UKM pertanian kepada industri hilir masih sangat tinggi, sehingga pelaku usaha sektor pertanian relatif tidak memiliki *bargaining power* dalam menentukan harga. Juga masalah luas lahan yang dimiliki petani plasma relatif terbatas. Sehingga kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan taraf hidup masyarakat petani secara lebih baik. Akibatnya terjadi ketimpangan perkembangan kesejahteraan antara perusahaan inti dengan petani

---

<sup>7</sup> Mastur, Akhmad Amien. 2006. Penataan Kelembagaan dan Permodalan bagi Pengembangan Industri Berbasis Pertanian. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Inovatif Pascapanen untuk Pengembangan Industri Berbasis Pertanian. 36-41.

plasmanya, dimana perusahaan inti dapat mengalami kemajuan keuangan yang cukup signifikan, sementara petani plasmanya relatif masih jauh tertinggal.

Disamping penelitian-penelitian di atas, Nurmanaf juga meneliti tentang kelebihan-kelebihan perbankan syariah dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya, dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Sistem Pembiayaan Mikro dalam Mendukung Usaha Pertanian di Pedesaan. Nurmanaf menyatakan bahwa selain memiliki dana yang sangat besar perbankan juga memiliki kelebihan dibanding lembaga pembiayaan lainnya, diantaranya: (1) Plafond pinjaman lebih besar dibanding lembaga pembiayaan lain, (2) Memiliki kekuatan hukum yang jelas, (3) Dapat melayani kebutuhan modal untuk segala jenis usaha dan lapisan masyarakat asalkan feasible, (4) Pada perbankan tertentu (BRI) sistem pembiayaan telah disesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian, dan (5) Memiliki sistem reward dan punishment yang tegas sehingga dapat mendorong masyarakat lebih bertindak profesional dalam berusaha.<sup>8</sup>

## Metodologi Penelitian

### Metoda *Analytical Network Process* (ANP)

Menurut Saaty, ANP adalah teori umum yang digunakan untuk mengukur secara relatif rasio prioritas komposit dari skala rasio individu tertentu. Hasil dari pengukuran ini mencerminkan pengukuran relatif dari pengaruh-pengaruh elemen yang saling berinteraksi atau saling berhubungan.<sup>9</sup> Metode ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan metode lain dalam analisis *decision making*. Keunggulan yang dimiliki oleh pendekatan ANP dibandingkan dengan pendekatan lain dalam *decision making*, secara lengkap telah dilakukan oleh Peniwati (2005) dalam studinya yang bertujuan mengidentifikasi metode *decision making* yang baik. Peniwati (2005) menyimpulkan bahwa metode ANP relatif memiliki keunggulan dibandingkan metode *decision making* yang lain

---

<sup>8</sup> Hilman, Ir. Imam. dkk. 2003. Perbankan Syariah Masa Depan. Jakarta: Senayan Abadi Publishing Nurmanaf, AR. dkk. 2006. Analisis Sistem Pembiayaan Mikro dalam Mendukung Usaha Pertanian di Pedesaan. Seminar Hasil Penelitian: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

<sup>9</sup> Saaty, Thomas L. 2001. Theory and Applications of the Analytic Network Process, Pittsburgh: University of Pittsburg.

berdasarkan beragam kriteria, seperti abstraksi masalah, keluasan struktur, kedalaman struktur, basis ilmiah dan validitas hasil. Secara lengkap kesimpulan studi Peniwati (2005) tersebut dirangkum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3. Komparasi Metode Decision Making**

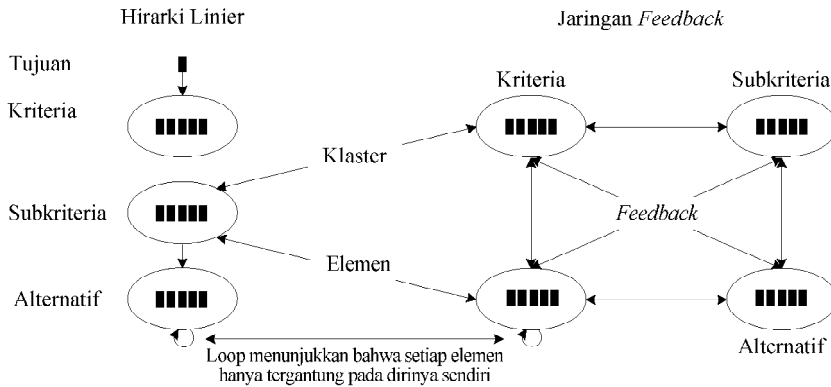
Method	Scope of Problem Abstraction	Breadth of Structure	Depth of Structure	Faithfulness of Judgment Analysis	Breadth & Depth of Analysis	Scientific & Math Generality	App. Of Intangibles	Validity of the Outcomes
Analogy	Medium	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Brainstorming	Low	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Delphi	Medium	Low	Low	Low	Low	Medium	NA	Low
Matrix Evaluation	Medium	High	Low	Medium	Medium	Low	Low	Medium
Bayesian Analysis	High	Low	Low	Very High	Medium	High	Medium	Medium
AHP	Very High	High	High	Very High	Very High	High	Very High	High
ANP	Very High	High	Very High	Very High	Very High	High	Very High	High

Sumber: Peniwati (2005) dalam Saaty dan Vargas (2006) dimodifikasi oleh Penulis

Kelebihan yang utama dari model ini adalah dalam hal kemampuannya memperlakukan faktor-faktor yang saling berhubungan (*dependence*) dan umpan balik (*feedback*) secara sistematis dengan mengakomodasi faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif. Keterkaitan antar kriteria pada metode ANP ada dua jenis yaitu keterkaitan dalam satu set *cluster* (*inner dependence*) dan keterkaitan antar *cluster* yang berbeda (*outer dependence*).

ANP merupakan proses pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan tanpa membuat asumsi tentang independensi elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen pada level yg lebih rendah dan tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level (Ascarya, 2007). Hal ini lebih disebabkan karena pada kenyataannya elemen-elemen yang menjadi dasar pengambilan keputusan saling mempengaruhi. Dengan demikian kerangka model ANP berbentuk jaringan, berbeda dengan AHP yang berbentuk hirarki. Hal ini yang menjadi alasan mengapa ANP dinilai lebih memberikan hasil yang akurat dibandingkan dengan AHP (*Analytic Hierarchy Process*).

**Gambar 1. Komparasi Struktur Kerangka AHP dan ANP**



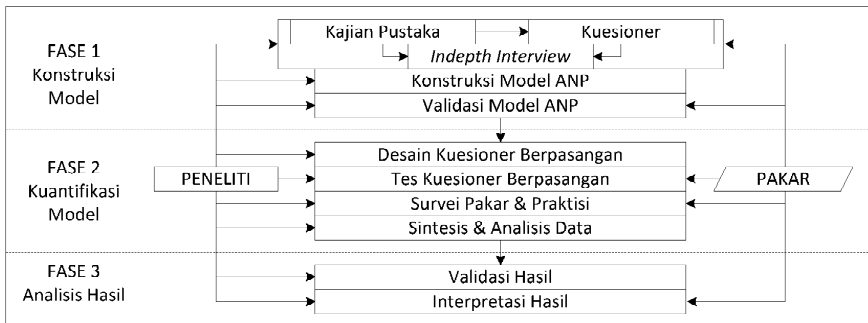
Sumber: Azis (2003); Saaty dan Vargas (2006) dimodifikasi oleh Penulis

Pada jaringan AHP terdapat level tujuan, kriteria, subkriteria dan alternatif, dimana masing-masing level memiliki elemen. Sementara itu, pada jaringan ANP, level dalam AHP disebut klaster yang dapat memiliki kriteria dan alternatif di dalamnya. Selanjutnya, ANP akan melakukan pembobotan atau penilaian atas pengalaman empiris terhadap variabel yang digunakan dalam usulan model integrasi. Selanjutnya, ANP akan menghasilkan skala rasio yang menunjukkan tingkat prioritas dengan cara menghitung secara dinamis keterkaitan keterkaitan antar elemenn yang satu dengan elemen yang lain.

ANP memiliki dua aksioma sederhana yang melandasi prosesnya termasuk secara hati-hati membatasi cakupan suatu masalah. Aksioma tersebut adalah: 1) Resiprokal. Aksioma ini menjadi pedoman dalam memberikan penilaian dalam pairwise comparison antar custer atau antara elemen, contohnya jika A 9 kali lebih dominan dari B, maka B 1/9 kali lebih dominan dari A; 2) Homogenitas. Aksioma ini menjadi pedoman dalam menentukan faktor-faktor yang menjadi elemen, elemen-elemen yang dibandingkan sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan kesalahan penilaian yang lebih besar.

Aksioma ini menjadi landasan pelaksanaan metode ANP, misalnya aksioma pertama menjadi landasan penggunaan *feedback* dan penilaian rasio prioritas. Sementara itu prinsip dasar ANP ada tiga, yaitu 1) Prinsip dekomposisi diterapkan untuk menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hirarki atau jaringan klaster, subklaster, sus-subklaster, dan seterusnya. Dengan kata lain

dekomposisi adalah memodelkan masalah ke dalam kerangka ANP; 2) Prinsip penilaian komparasi diterapkan untuk membangun perbandingan pasangan dari semua elemen dalam kluster dilihat dari kluster induknya. Dengan kata lain penilaian komparasi adalah acuan dalam mendapatkan rasio prioritas; 3) Prinsip komposisi hirarkis atau sintesis diterapkan untuk mengalikan prioritas lokal dari elemen dalam kluster dengan prioritas 'global' dari elemen induk, yang akan menghasilkan prioritas global seluruh hirarki dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas global untuk elemen level terendah. Dengan kata lain komposisi hirarkis adalah acuan dalam mendapatkan skala prioritas menyeluruh.



**Gambar 2. Tahapan Penelitian**

Secara umum terdapat 3 fase atau tahapan dalam melakukan analisis menggunakan pendekatan ANP, yaitu: (i) Konstruksi Model; (ii) Kuantifikasi Model; dan (iii) Analisis Hasil. Teknis pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama. Konstruksi model ANP yaitu mengidentifikasi variabel apa saja yang akan digunakan dalam model ANP terkait dengan tujuan penelitian. Identifikasi variabel-variabel tersebut dilakukan berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris dan informasi dari pakar melalui *in-depth interview* atau FGD. *In-depth interview* atau FGD bermanfaat untuk mengkaji informasi secara lebih dalam khususnya mengkonfirmasi karakteristik khusus yang dimiliki pada lingkungan penelitian untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya. Hal ini penting karena jika hanya bersandar pada penelitian yang ada, dimungkinkan penelitian yang akan dilakukan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu klarifikasi, konfirmasi atau validasi sekaligus penajaman model.

2. Tahap Kedua. Kuantifikasi Model ANP dimulai dengan penyusunan kuesioner yang merujuk pada Model ANP yang telah divalidasi. Kuesioner ANP disusun menggunakan pertanyaan berupa *pairwise comparison* antar elemen dalam klaster dan antar klaster itu sendiri, untuk menentukan mana diantara keduanya yang lebih dominan pengaruhnya dan seberapa besar perbedaannya dilihat dari satu sisi. Kuesioner yang telah tersusun sepatutnya diuji atau divalidasi kembali oleh para pakar melalui *in-depth interview*. Formulasi kuesioner menggunakan pendekatan perbandingan pasangan bertujuan untuk mengetahui mana diantara keduanya, baik antar elemen maupun antar klaster, yang lebih besar pengaruhnya atau lebih dominan. Dari perbandingan pasangan ini akan diketahui seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Skala numerik 1-9 yang digunakan merupakan terjemahan dari penilaian verbal.

**Tabel 4. Perbandingan Skala Verbal dan Skala Numerik**

DEFINISI	SKALA VERBAL	SKALA NUMERIK
<i>The evidence favoring one activity over another is of the highest possible order of affirmation</i>	<i>Extreme importance</i>	9
	<i>Very, very strong</i>	8
<i>An activity is favored very strongly over another; its dominance demonstrated in practice</i>	<i>Very strong or demonstrated importance</i>	7
	<i>Strong plus</i>	6
<i>Experience and judgment strongly favor one activity over another</i>	<i>Strong importance</i>	5
	<i>Moderate plus</i>	4
<i>Experience and judgment slightly favor one activity over another</i>	<i>Moderate importance</i>	3
	<i>Weak or slight</i>	2
<i>Two activities contribute equally to the objective</i>	<i>Equal Importance</i>	1

3. Tahap Ketiga. Analisa Hasil ANP yang merupakan langkah utama yaitu menganalisis hasil olah data berdasarkan supermatriks ANP yang menghasilkan *eigenvector*. Analisis yang dilakukan berupa komparasi skala prioritas yang didapat

berdasarkan *eigenvector* supermatriks ANP. Pengukuran ke dalam skala rasio yang kemudian menunjukkan skala prioritas dari setiap elemen yang ada pada model. Secara sederhana, penggunaan *pairwise comparison* dalam membandingkan antar klaster atau elemen dapat ditulis dalam suatu matrik yang menunjukkan nilai perbandingan tersebut.

### Pendekatan *Benefits, Opportunities, Costs, Risks* (BOCR)

Menurut Saaty dan Vargas (2006) pada penelitian dengan jaringan BOCR hubungan antara *benefit, opportunity, cost* dan *risk* dipengaruhi oleh faktor-faktor umum. Analisa *Benefit, Opportunities, Cost, Risk* (BOCR) merupakan analisa penentuan prioritas berdasarkan hasil perhitungan kriteria yang diinginkan sebagai keuntungan (*benefit*) dan kriteria yang tidak diinginkan sebagai beban (*cost*). Disamping itu pula terdapat kriteria berdasarkan peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang, yang mungkin dapat terjadi sebagai hal yang positif (*opportunity*) dan hal-hal yang dapat mengakibatkan risiko negatif (*risk*).

Saaty dan Vargas (2006) menjabarkan hasil dari beberapa alternatif yang diprioritaskan, didapatkan dari tiga hasil, kondisi umum (*standard condition*) yang didapatkan dari perhitungan  $B/C$ , *Pessimistic*  $B/(CxR)$  dan *Realistic*  $(BxO)/(CxR)$ . Alternatif yang terbaik dipilih dengan nilai *realistic* yang tinggi dan alternatif terpilih tersebut dipertimbangkan sebagai keputusan yang ditentukan dari alternatif lain.

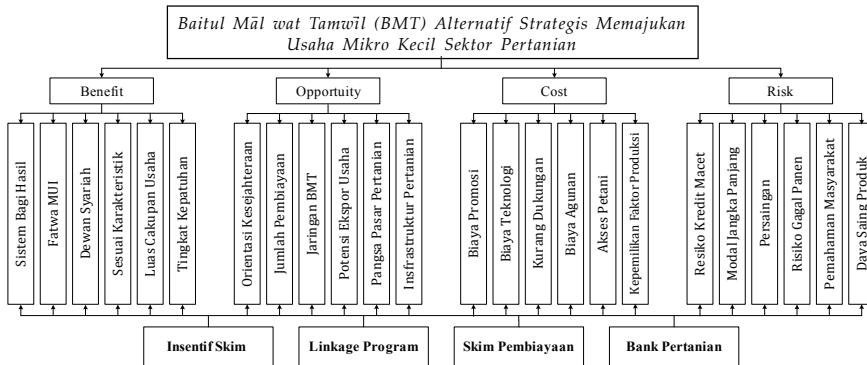
Nilai *realistic* ini juga serupa dengan teori Saaty (2001) lainnya yaitu dimana terdapat dua jenis perhitungan yang dihasilkan BOCR:

- a) *Additive negative formula* = rumus ini biasanya digunakan untuk menentukan prioritas jangka panjang. Dengan rumus  $bB + oO - cC - rR$
- b) *Multiplicative formula* = setara dengan marginal *cost*/analisis *benefit* dan pada umumnya digunakan untuk menentukan prioritas jangka pendek. Dengan rumus  $BO/CR$

Selain rumus tersebut, pengambilan keputusan juga didapat dari jenis penghitungan lainnya yang dikemukakan oleh Emanuel dan Cefalu (2006) pada hasil penelitiannya yaitu penghitungan yang biasanya digunakan untuk menentukan prioritas jangka panjang, atau *additive negative formula*. Dengan rumus  $bB + oO + c(1-C) + r(1-R)$ .

### Kerangka Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya maka dalam hal pengembangan BMT sebagai alternatif strategis dalam memajukan usaha mikro kecil sektor pertanian di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu terdiri dari *cluster Benefit Opportunity Cost Risk* (BOCR) sebagai analisa strategisnya.



Gambar 3. Kerangka Penelitian

### Analisis dan Pembahasan

#### Dekomposisi Masalah

Permasalahan dalam hal pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif strategis dalam memajukan usaha kecil menengah sektor pertanian di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu internal, yaitu lembaga keuangan syariah itu sendiri dan eksternal, yaitu para pelaku usaha mikro di sektor pertanian. *Cluster-cluster* secara keseluruhan dikelompokkan menjadi *cluster* aspek dan strategi. Permasalahan pada model ini menggunakan pendekatan jaringan *Benefit Opportunity Cost Risk* (BOCR) sebagai analisa strategisnya.

Berdasarkan kondisi yang sesuai di lapangan yang berasal dari *in-depth interview* dengan beberapa praktisi di sektor masing-masing serta kajian pustaka, penguraian masalah pengembangan BMT sebagai alternatif strategis dalam memajukan usaha mikro kecil sektor pertanian di Indonesia, dikelompokkan menjadi sebagai berikut:



**Tabel 5. Definisi *Cluster* dan *Element* di dalam *Cluster Alternative***

<b>BENEFIT:</b> Segala aspek yang dapat memberikan manfaat atau keunggulan bagi masyarakat pelaku usaha sektor pertanian pada umumnya dan para pemangku kebijakan seperti pemerintahan serta manajemen BMT pada khususnya.
<b>Sistem Bagi Hasil</b> (Wulandari & Suroso, 2004, p.42): Menetapkan sistem bagi risiko & bagi hasil secara adil
<b>Fatwa MUI</b> (Wulandari & Suroso, 2004, p.42) Memanfaatkan momentum fatwa majelis ulama tentang bunga bank itu riba
<b>Dewan Syariah</b> (Wulandari & Suroso, 2004, p.42) Seluruh kegiatan berada di bawah pengawasan Dewan Syariah
<b>Sesuai Karakteristik</b> (Nurmanaf, 2006 p.18, Ashari dan Saptana, 2005. p. 143) Karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian.
<b>Luas Cakupan Usaha</b> (Ashari dan Saptana, 2005. p. 143) Luasnya cakupan usaha bisnis pertanian
<b>Tingkat Kepatuhan</b> (Ashari dan Saptana, 2005. p. 143) Masyarakat Petani di Indonesia memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, khususnya di daerah pedesaan
<b>OPPORTUNITY:</b> Segala aspek yang dimaksudkan sebagai peluang yang menguntungkan di masa yang akan datang sebagai akibat adanya pengembangan LKS sebagai alternatif strategis dalam memajukan usaha mikro kecil sektor pertanian
<b>Orientasi Kesejahteraan</b> (Wulandari & Suroso, 2004. p.42) BMT tidak menerapkan sistem bunga sehingga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
<b>Jumlah Pembiayaan</b> (Mançka, 2012. p.64, Wulandari & Suroso, 2004. p.42) Skala usaha pertanian adalah mikro-kecil. Jika bank-bank masuk ke sektor pertanian, mereka akan memiliki sejumlah pembiayaan yang cukup besar. Sehingga memasukkan sektor pertanian dalam portofolio pembiayaan secara signifikan, yaitu dengan memperbesar porsi pendanaan sektor pertanian
<b>Jaringan BMT</b> (Ashari dan Saptana, 2005. p. 144) Akan meningkatkan kantor jaringan atau titik layanan BMT, terutama pedesaan
<b>Potensi Ekspor Usaha</b> (Suroso, 2004, p.34) Peningkatan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memungkinkan dengan kapasitas produksi yang besar dapat membuka jaringan pasar ekspor Internasional
<b>Pangsa Pasar Pertanian</b> (Hilman, 2003 p.134, Data Ekspor Agribisnis Indonesia, 2010) Sektor pertanian Indonesia, dalam arti luas (termasuk perikanan dan kehutanan), berpeluang untuk lebih berkembang
<b>Infrastruktur Pertanian</b> (Pasaribu et al, 2007, Mançka, 2012. P6.7) Meningkatkan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur. Dengan cara ini, produksi pertanian akan tiba tepat waktu dan tidak rusak di pasar penjualan
<b>COST:</b> Segala aspek yang dapat mengakibatkan beban atau kerugian bagi masyarakat pelaku usaha sektor pertanian pada umumnya dan para pemangku kebijakan seperti pemerintahan serta manajemen BMT pada khususnya.
<b>Biaya Promosi</b> (Ashari dan Saptana, 2005. p. 146, Hilman, 2003, p.56) Memantapkan upaya sosialisasi pembiayaan syariah ke masyarakat petani dan pejabat publik sektor pertanian dibutuhkan biaya untuk skala besar
<b>Biaya Teknologi</b> (Wulandari, Suroso, 2004. P.41, Mastur, 2006, p.38) Keterbatasan pengadaan teknologi menjadikan salah satu beban biaya untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi

## Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT) sebagai Alternatif Strategis...

<p><b>Kurang Dukungan</b> (<i>Ashari dan Saptana, 2005. p. 146, Arifin, 2007</i>)                  Kurangnya dukungan peraturan hukum baik di tingkat daerah sebagai unit otonom maupun di tingkat pusat</p>
<p><b>Biaya Agunan</b> (<i>Ashari, 2009, p.25, Nurmanaf, 2006 p.18, Mançka, 2012. p.67, Mastur, 2006, p.38</i>)                  Penyediaan agunan adalah persyaratan yang paling sulit, dengan menetapkan barang yang telah memiliki kekuatan hukum formal (sertifikat) masih sangat memberatkan, sehingga berpengaruh terhadap nilai pinjaman yang diberikan</p>
<p><b>Akses Pasar</b> (<i>Wulandari, Suroso, 2004 p.41, Mançka, 2012. p.41, Nurmanaf, 2006 p.18</i>)                  Karena persyaratan pengajuan pembiayaan masih sangat rigid, sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses pinjaman yang disalurkan</p>
<p><b>Kepemilikan Faktor Produksi</b> (<i>Mastur, 2006, p.38, Wulandari, Suroso, 2004. P.41, Ashari, 2009, p.25</i>)                  Rendahnya kepemilikan faktor produksi, luas lahan yang dimiliki petani plasma relatif terbatas, sehingga kurang menguntungkan</p>
<p><b>RISK:</b> Segala aspek yang dimaksudkan sebagai risiko yang merugikan di masa yang akan datang sebagai akibat adanya pengembangan LKS sebagai alternatif strategis dalam</p>
<p><b>BENEFIT:</b> Segala aspek yang dapat memberikan manfaat atau keunggulan bagi masyarakat pelaku usaha sektor pertanian pada umumnya dan para pemangku kebijakan seperti pemerintahan serta manajemen BMT pada khususnya.</p>
<p><b>Sistem Bagi Hasil</b> (<i>Wulandari &amp; Suroso, 2004, p.42</i>):                  Menetapkan sistem bagi risiko &amp; bagi hasil secara adil</p>
<p><b>Fatwa MUI</b> (<i>Wulandari &amp; Suroso, 2004, p.42</i>)                  Memanfaatkan momentum fatwa majelis ulama tentang bunga bank itu riba</p>
<p><b>Dewan Syariah</b> (<i>Wulandari &amp; Suroso, 2004, p.42</i>)                  Seluruh kegiatan berada di bawah pengawasan Dewan Syariah</p>
<p><b>Sesuai Karakteristik</b> (<i>Nurmanaf, 2006 p.18, Ashari dan Saptana, 2005. p. 143</i>)                  Karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian.</p>
<p><b>Luas Cakupan Usaha</b> (<i>Ashari dan Saptana, 2005. p. 143</i>)                  Luasnya cakupan usaha bisnis pertanian</p>
<p><b>Tingkat Kepatuhan</b> (<i>Ashari dan Saptana, 2005. p. 143</i>)                  Masyarakat Petani di Indonesia memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, khususnya di daerah pedesaan</p>
<p><b>OPPORTUNITY:</b> Segala aspek yang dimaksudkan sebagai peluang yang menguntungkan di masa yang akan datang sebagai akibat adanya pengembangan LKS sebagai alternatif strategis dalam memajukan usaha mikro kecil sektor pertanian</p>
<p><b>Orientasi Kesejahteraan</b> (<i>Wulandari &amp; Suroso, 2004. p.42</i>)                  BMT tidak menerapkan sistem bunga sehingga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat</p>
<p><b>Jumlah Pembiayaan</b> (<i>Mançka, 2012. p.61, Wulandari &amp; Suroso, 2004. p.12</i>)                  Skala usaha pertanian adalah mikro-kecil. Jika bank-bank masuk ke sektor pertanian, mereka akan memiliki sejumlah pembiayaan yang cukup besar. Sehingga memasukkan sektor pertanian dalam portofolio pembiayaan secara signifikan, yaitu dengan memperbesar porsi pendanaan sektor pertanian</p>
<p><b>Jaringan BMT</b> (<i>Ashari dan Saptana, 2005. p. 144</i>)                  Akan meningkatkan kantor jaringan atau titik layanan BMT, terutama pedesaan</p>
<p><b>Potensi Ekspor Usaha</b> (<i>Suroso, 2004, p.34</i>)                  Peningkatan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memungkinkan dengan kapasitas produksi yang besar dapat membuka jaringan pasar ekspor Internasional</p>
<p><b>Pangsa Pasar Pertanian</b> (<i>Hilman, 2003 p.134, Data Ekspor Agribisnis Indonesia, 2010</i>)                  Sektor pertanian Indonesia, dalam arti luas (termasuk perikanan dan kehutanan), berpeluang untuk lebih berkembang</p>

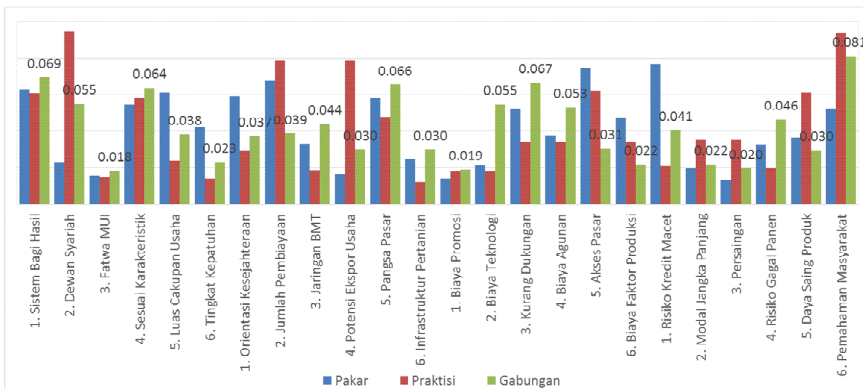
<p><b>Infrastruktur Pertanian</b> (Pasaribu et al, 2007, Mançka, 2012. P.6.7) Meningkatkan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur. Dengan cara ini, produksi pertanian akan tiba tepat waktu dan tidak rusak di pasar penjualan <i>COST</i>: Segala aspek yang dapat mengakibatkan beban atau kerugian bagi masyarakat pelaku usaha sektor pertanian pada umumnya dan para pemangku kebijakan seperti pemerintahan serta manajemen BMT pada khususnya.</p>
<p><b>Biaya Promosi</b> (Ashari dan Saptana, 2005. p. 146, Hilman, 2003, p.56) Memantapkan upaya sosialisasi pembiayaan syariah ke masyarakat petani dan pejabat publik sektor pertanian dibutuhkan biaya untuk skala besar</p>
<p><b>Biaya Teknologi</b> (Wulandari, Suroso, 2004. P.41, Mastur, 2006, p.38) Keterbatasan pengadaan teknologi menjadikan salah satu beban biaya untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi</p>
<p><b>Kurang Dukungan</b> (Ashari dan Saptana, 2005. p. 146, Arifin, 2007) Kurangnya dukungan peraturan hukum baik di tingkat daerah sebagai unit otonom maupun di tingkat pusat</p>
<p><b>Biaya Agunan</b> (Ashuri, 2009, p.25, Nurmanaf, 2006 p.18, Mançka, 2012. p.67, Mastur, 2006, p.38) Penyediaan agunan adalah persyaratan yang paling sulit, dengan menetapkan barang yang telah memiliki kekuatan hukum formal (sertifikat) masih sangat memberatkan, sehingga berpengaruh terhadap nilai pinjaman yang diberikan</p>
<p><b>Akses Pasar</b> (Wulandari, Suroso, 2004 p.41, Mançka, 2012. p.41, Nurmanaf, 2006 p.18) Karena persyaratan pengajuan pembiayaan masih sangat rigid, sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses pinjaman yang disalurkan</p>
<p><b>Kepemilikan Faktor Produksi</b> (Mastur, 2006, p.38, Wulandari, Suroso, 2004. P.41, Ashari, 2009, p.25) Rendahnya kepemilikan faktor produksi, luas lahan yang dimiliki petani plasma relatif terbatas, sehingga kurang menguntungkan</p>
<p><b>RISK</b>: Segala aspek yang dimaksudkan sebagai risiko yang merugikan di masa yang akan datang sebagai akibat adanya pengembangan LKS sebagai alternatif strategis dalam memajukan usaha mikro kecil sektor agribisnis</p>
<p><b>Risiko Pembiayaan Macet</b> (Ashari, 2009, p.13, p.25, Mançka, 2012. p.64, Mastur, 2006, p.38) Perbankan memandang sektor pertanian sangat risky sehingga sangat berhati-hati dalam pemberian pembiayaan, karena adanya risiko pembiayaan macet</p>
<p><b>Modal Jangka Panjang</b> (Arifin, 2007) Pengembangan <i>forward financing</i> akan menambah biaya jangka panjang</p>
<p><b>Persaingan</b> (Mastur, 2006, p.38) Masalah persaingan baik persaingan antar lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi pada praktiknya, persaingan yang paling ketat adalah antara LKMS dengan perbankan syariah yang juga menyediakan layanan mikro</p>
<p><b>Risiko Gagal Panen</b> (Mançka, 2012. p.64, Mastur, 2006, p.38) Sektor pertanian menghadapi berbagai risiko tinggi (cuaca, hama, kandungan gizi dalam produksi, risiko harga yang tinggi) sehingga Bank tidak berani memberikan pembiayaan pada sektor pertanian yang memiliki tingkat risiko usaha tinggi</p>
<p><b>Pemahaman Masyarakat</b> (Ashari dan Saptana, 2005, p.144) pemahaman SDM, baik di tingkat penguasa pertanian, pelaku pembiayaan syariah, maupun policy maker terhadap pembiayaan Syariah</p>
<p><b>Daya Saing Produk Agro</b> (Mastur, 2006, p.38) Rendahnya sistem pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, tingginya <i>cost structure</i>, prasarana dan sarana yang minim, serta teknologi yang masih relatif tertinggal dibanding sektor industri menyebabkan rendahnya daya saing produk</p>
<p><b>ALTERNATIVE</b>: Strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh LKS sebagai alternatif strategis dalam memajukan usaha mikro kecil sektor pertanian di Indonesia.</p>

Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT) sebagai Alternatif Strategis...

<p><b>Bank Pertanian</b> (Wulandari &amp; Suroso, 2004, p.42, Ashari, 2009, p.25, Mançka 2012, p.64, Adam, 2012, p.103, Syukur, 2009)</p> <p>Tujuan dari pembentukan ini adalah untuk pengembangan sektor pertanian, mengkoordinasikan dan mengawasi pemberian pembiayaan untuk kegiatan pertanian, dan menyediakan pinjaman dan fasilitas pembiayaan.</p>
<p><b>Linkage Program</b> (Mançka 2012, p.64, Pasaribu, 2007, p. 24, Krisnamurthi, 2003, p.15-16)</p> <p>Melalui pengembangan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro lain, Lembaga Keuangan Agribisnis (LKA), BPRS dan lain-lain. Serta bekerjasama dengan pemerintah, seperti Gapoktan, Bantuan Langsung Pupuk (BLP), Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Pembiayaan Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)</p>
<p><b>Skim Pembiayaan</b> (Wulandari &amp; Suroso, 2004, p.42, Ashari, 2009, p.25, Arifin 2009, Ashari dan Saptanu, 2005. p. 143)</p> <p>Menyediakan berbagai alternatif pola pendanaan yang berdasarkan subsektor kegiatan dan memberlakukan sistem pendanaan yang memperhatikan jadwal dan tahapan kegiatan Pertanian.</p>
<p><b>Insentif Skim</b> (Ashari dan Saptana, 2005. p. 146, Ishak, 2011, p.9)</p> <p>Pelaksanaan mekanisme insentif dan sanksi untuk menciptakan keadilan dalam pengelolaan pembiayaan. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah</p>

Analisis Benefit, Opportunities, Cost, Risk (BOCR)

Pada analisa ini menjelaskan mengenai hasil secara keseluruhan. Bagaimana kecenderungan responden terhadap permasalahan dalam pengembangan BMT sebagai alternatif strategis dalam memajukan usaha mikro kecil sektor pertanian di Indonesia berdasar pada nilai *geometric mean*. Pada gambar di bawah ini terlihat urutan prioritas permasalahan yang dimulai dari *benefit*, *opportunity*, *cost* dan *risk*. Berikut dapat dilihat kontribusi masing-masing elemen pada setiap aspek:



Gambar 4. Prioritas Elemen

Berdasarkan hasil di atas menyimpulkan bahwa lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh sektor pertanian yaitu lembaga keuangan yang menerapkan sistem bagi hasil. Sektor pertanian, sangat dipengaruhi faktor alam yang merupakan faktor yang berada di luar kendali manusia dan output yang dihasilkan memiliki karakteristik khusus yaitu mudah rusak, beragam kuantitas dan kualitas, dan dengan harga yang sangat berfluktuasi, membutuhkan lembaga keuangan yang memiliki tiga prinsip utama, yaitu menetapkan sistem bagi risiko dan bagi hasil secara adil, yaitu dengan memperhitungkan kemungkinan untung dan rugi, menghindari penetapan besaran keuntungan di awal perjanjian dan menetapkan bagi hasil berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh.

Hingga saat ini tidak terdapat keterangan pasti mengenai jumlah dan persebaran BMT. Kementerian Koperasi dan UKM hanya mencatat data mengenai jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KSP/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi dan KJKS/Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2012 meningkat sebesar 35.9%. Jumlah KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi meningkat dari 72.037 unit pada tahun 2011 menjadi 97.950 unit taun 2012, terdiri dari 8.761 unit KSP, 86.203 unit USP Koperasi, 898 unit KJKS dan 2.088 unit UJKS Koperasi. Sementara Kholim (2004, dalam Sakti 2013) menyebutkan bahwa jumlah BMT terbesar di Indonesia meliputi wilayah Jawa Barat dengan 637 BMT (433 BMT yang melaporkan kegiatannya ke PINBUK), Jawa Timur dengan 600 BMT (519 BMT yang melaporkan kegiatannya) dan Jawa Tengah menduduki urutan ketiga dengan 513 BMT (447 BMT yang melaporkan kegiatannya). Sehingga *opportunity* yang disimpulkan dari data di atas ialah banyaknya jaringan BMT sangat berpengaruh terhadap kelangsungan para pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan bantuan permodalan.

Dari segi *cost*, beban sektor pertanian saat ini ialah kurangnya dukungan. Misal kurangnya dukungan pemerintah dan institusi terkait yang menyeluruh kepada para petani maupun buruh tani. Anggaran untuk pembiayaan pertanian relatif kecil dan tersebar di berbagai instansi melalui kerjasama program atau kegiatan. Kejelasan hubungan diantara institusi terkait tersebut sangat diperlukan agar kerjasama yang sinergis dan harmonis dapat tercipta untuk bersama-sama mendorong pengembangan usaha mikro sektor pertanian di Indonesia.

Sementara pemahaman masyarakat juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini sejalan dengan simpulan Ashari dan Saptana (2005: 144) bahwa pemahaman SDM, baik di tingkat pengusaha pertanian, pelaku pembiayaan syariah, maupun *policy maker* terhadap pembiayaan syariah masih rendah. Hal ini lah yang mengakibatkan tingginya risiko dalam menjadikan BMT sebagai alternatif strategis. Implikasi dari kurangnya pemahaman masyarakat saat ini dapat dilihat dari sedikitnya masyarakat yang mengetahui dan memahami produk-produk perbankan yang dikeluarkan dengan sistem syariah.

Dalam rangka menentukan urutan prioritas dari alternatif-alternatif utama yang membahas BMT untuk memajukan usaha mikro sektor pertanian, analisis ANP digunakan. Hasil perhitungan *Kendall's coefficient of concordance (W)* atau *rater agreement* yang menunjukkan tingkat kesepakatan di antara para responden dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6. Rater Agreement Responden**

CLUSTER	Kendall's Coefficient of Concordance (W)					
	Praktisi Tani	P-value	Expert	P-value	Overall	P-value
BOCR	0.2187	0.176	0.0437	0.910	0.2117	0.192
ALTERNATIF STRATEGIS	<b>0.6735</b>	0.002***	<b>0.5082</b>	0.021**	<b>0.3082</b>	0.073*
Benefit	<b>0.4612</b>	0.021**	<b>0.3061</b>	0.093*	0.1755	0.297
Opportunity	<b>0.7714</b>	0.001***	<b>0.5265</b>	0.011**	<b>0.5265</b>	0.011**
Cost	0.2327	0.180	<b>0.4367</b>	0.027**	0.2653	0.134
Risk	0.0776	0.653	<b>0.6898</b>	0.002***	<b>0.6245</b>	0.004***

\*\*\*significant at the 0.01 level

\*\*significant at the 0.05 level

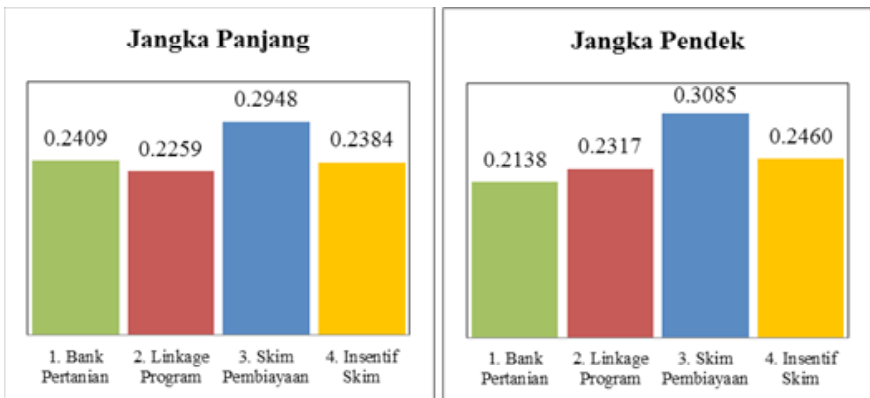
\*significant at the 0.10 level

*Rater agreement* adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden ( $R_1-R_n$ ) terhadap suatu masalah dalam satu klaster. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance (W;  $0 < W \leq 1$ )*.  $W=1$  menunjukkan kesesuaian yang sempurna, yaitu jika nilai pengujian  $W$  sebesar 1 ( $W=1$ ), dapat disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesesuaian yang sempurna. Sedangkan ketika nilai  $W$  sebesar 0 atau semakin mendekati 0, maka menunjukkan adanya ketidaksesuaian antar jawaban responden atau jawaban bervariasi.

Dari tujuh klaster yang dievaluasi, secara signifikan praktisi tani sepakat pada 3 klaster, pakar sepakat pada lima klaster, dan secara keseluruhan praktisi dan pakar LKMS/BMT sepakat pada tiga klaster. Tingkat kesepakatan praktisi dan pakar dapat ditingkatkan dengan melakukan survei konfirmasi kepada mereka.

### Analisis Alternatif Strategis

Setelah tahapan penilaian kriteria aspek dilakukan maka perhitungan berikutnya adalah analisis alternatif strategi. Hasil sintesis menunjukkan alternatif strategis yang paling prioritas berdasarkan analisis BOCR jangka panjang adalah skim pembiayaan (0.2948), bank pertanian (0.2409), insentif skim (0.2384) dan linkage program (0.2259). Sedangkan hasil pengolahan data dalam menganalisis BOCR jangka pendek dalam menentukan alternatif strategis yang paling prioritas ialah skim pembiayaan (0.3085), insentif skim (0.2460), linkage program (0.2317) dan bank pertanian (0.2138).



**Gambar 6. Prioritas Alternatif Jangka Panjang dan Jangka Pendek**

Hasil dari analisis alternatif BOCR seperti yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa keputusan yang berfokus pada prioritas jangka panjang sekaligus jangka pendeknya ialah pada penentuan skim pembiayaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2004: 42), Ashari dan Saptana (2005: 143), Arifin (2005) dan Ashari (2009: 25). Bahwa LKS perlu

untuk menyediakan berbagai alternatif pola pendanaan yang berdasarkan subsektor kegiatan (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan) dan memberlakukan sistem pendanaan yang memperhatikan jadwal dan tahapan kegiatan pertanian itu sendiri sehingga berbagai kendala yang dihadapi pada setiap rangkaian usaha dapat teratasi.<sup>10</sup>

Skim pembiayaan pertanian syariah ini dibentuk sedemikian rupa untuk melayani masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau pengusaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor pertanian. Skim ini selain memiliki karakteristik yang identik dengan pasar sasarannya yaitu sektor mikro, juga harus mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tidak menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan mentaati kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*). Penggunaan kontrak dan produk syariah akan memberikan keleluasaan kepada pelaksana skim (Lembaga Keuangan) dalam menangani dan melayani heterogenitas jenis usaha di sektor pertanian. Masyarakat pun akan terbantu dengan skim syariah ini karena cara pembayarannya pun bisa lebih fleksibel.

Alternatif pola pendanaan yang dapat dilakukan antara lain: Pembukaan lahan dengan kendala biaya yang besar maka jenis pendanaannya ialah Murabahah. Pengadaan alat dan mesin dengan kendala biaya besar dan modal di awal maka jenis pendanaannya ialah Ijarah. Budidaya dengan kendala risiko besar maka jenis pendanaannya ialah Istisna. Panen dengan kendala kepastian jumlah dan mutu maka jenis pendanaannya ialah Ba'i Salam. Pengadaan alat pengolahan dengan kendala biaya yang besar maka jenis pendanaannya ialah Ijarah. Pengolahan dengan kendala biaya yang besar maka jenis pendanaannya ialah Mudharabah. Pemasaran dengan kendala kepastian harga maka jenis pendanaannya ialah Ba'i Salam. Transfer Teknologi dan Pengembangan SDM dengan kendala biaya yang besar maka jenis pendanaannya ialah Musyarakah. Pemenuhan biaya hidup dengan kendala kontinuitas maka jenis pendanaannya ialah Qard Hasan. Serta perlindungan aset dengan kendala risiko besar maka jenis pendanaannya ialah Takaful. Pola-pola pembayaran yang fleksibel

---

<sup>10</sup> Ashari dan Saptana, 2005. Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 23 No.2. 132-147.



dan disesuaikan dengan pola *cash flow* nasabah yang dirancang dalam skim ini, akan membantu masyarakat yang bergerak di sektor pertanian.

Hasil selanjutnya menunjukkan, alternatif strategis jangka panjang yang menjadi prioritas kedua ialah dengan membentuk Bank Pertanian di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengembangkan sektor pertanian, mengkoordinasikan dan mengawasi pemberian pembiayaan untuk kegiatan pertanian dan menyediakan pinjaman serta fasilitas pembiayaan termasuk kegiatan pertanian. Menurut kalangan pakar, mereka berpendapat bahwa dalam mendirikan bank pertanian perlu ada masa transisi. Walaupun bank pertanian tidak langsung berdiri sebagai wujud bank dimana aspek hukum yang harus tunduk dan memenuhi syarat-syarat hukum perbankan, akan tetapi bank pertanian dapat dibentuk melalui lembaga-lembaga BUMD. Oleh karena itu, menurut hasil sintesis jangka panjang, pendirian bank pertanian merupakan alternatif kedua dalam memajukan usaha mikro sektor pertanian.

Sementara itu, ada atau tidaknya bank khusus pertanian, pembiayaan pertanian tetap harus berjalan. Keberadaan bank khusus pertanian ini masih memerlukan waktu yang panjang, karena perlu menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai pelaksana. Selain itu, proses pembentukan dan operasionalnya rawan akan kepentingan politik. Hal ini sejalan dengan hasil pengolahan jangka pendek di atas, dimana keputusan pendirian bank pertanian adalah prioritas terakhir yang dilakukan untuk memajukan usaha mikro sektor pertanian.

Prioritas selanjutnya ialah dengan insentif skim, baik berupa *reward* maupun berbentuk *punishment*. Insentif dapat diberikan tergantung kebijakan dari lembaga bersangkutan. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan secara jumlah tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi. Insentif diberikan kepada nasabah yang melakukan angsuran tepat waktu (misalnya: keterlambatan maksimal 3 hari kerja) selama jangka waktu pembiayaan akan diberikan insentif. Sedangkan *punishment* (sanksi) diberikan kepada nasabah jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Dampak psikologis dengan adanya pemberlakuan *reward* and *punishment* akan berpengaruh terhadap kepatuhan dan ketaatan serta kedisiplinan pembayaran angsuran.

Hasil dari analisis BOCR selanjutnya, menunjukkan bahwa keputusan yang berfokus pada prioritas jangka panjang serta jangka pendek selanjutnya ialah pelaksanaan program kerjasama. Melalui pengembangan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro lain yang dapat lebih berperan bersama, Lembaga Keuangan Agribisnis (LKA), Bank Per pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan lain-lain. Serta bekerjasama dengan pemerintah, baik melalui program bantuan sosial maupun subsidi faktor produksi yang selama ini telah menjadi kebijakan pemerintahan.

Dalam prioritas jangka pendek, pelaksanaan program kerjasama ini lebih dipentingkan dari pada pembentukan Bank khusus pertanian. Menurut Ashari (salah satu responden Praktisi) menyebutkan bahwa hal praktis yang mungkin dapat dilakukan pemerintah ialah memanfaatkan semaksimal mungkin lembaga pembiayaan yang telah eksis (bank maupun nonbank) untuk didorong agar memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap sektor Pertanian. Untuk memperlancar pembiayaan perlu diintensifkan kegiatan linkage program antara LKS di perkotaan dengan lembaga keuangan mikro lainnya terutama BMT yang telah banyak berkembang di wilayah berbasis pertanian. Hal ini dikarenakan pendirian bank pertanian dipandang ideal tetapi cukup kompleks dalam implementasinya dan memerlukan proses yang panjang, sehingga pendirian Bank Pertanian mendapatkan peringkat terakhir dalam analisis jangka pendeknya.

### Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan urutan prioritas, maka alternatif strategi jangka panjang yang dianggap dapat mengembangkan UMK di sektor pertanian di Indonesia terdiri dari: (1) menyediakan berbagai alternatif skim pembiayaan yang memperhatikan jadwal dan tahapan kegiatan pertanian, (2) membentuk Bank Pertanian, yang mampu menyediakan pinjaman dan fasilitas pembiayaan bagi kegiatan pertanian, (3) pengadaan insentif skim, dimana dalam pelaksanaan kegiatan pendanaan BMT menggunakan mekanisme insentif dan sanksi untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah, dan (4) mengadakan *Linkage Program*. Baik melalui pengembangan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro lain yang dapat lebih berperan bersama.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan analisa BOCR sebagai pendekatan sintesis, maka output yang dihasilkan dihitung berdasarkan perhitungan *realistic* dan *additive*. Berdasarkan urutan prioritas, maka alternatif jangka pendek diketahui bahwa pembentukan Bank Pertanian ialah alternatif yang tidak terlalu diprioritaskan, karena menempati prioritas terakhir diantara alternatif-alternatif lainnya.

Dengan menerapkan konsep utama dari keempat strategi pengembangan inilah maka peran LKS akan semakin besar. Pada akhirnya kesesuaian antara kebutuhan sektor pertanian dan tawaran pelayanan dari BMT inilah yang akan menciptakan sinergi besar dalam pergerakan sektor riil. Optimalisasi peran sebagai lembaga penunjang pembangunan nasional pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan sistem pertanian sebagai sebuah mega bisnis masa depan yang tangguh dan berdaya saing.

Lembaga keuangan syariah khususnya BMT memiliki prospektif yang baik untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif penguatan modal pada usaha di sektor pertanian. Perkembangan LKS yang cukup pesat serta komitmennya yang kuat untuk mendanai sektor riil merupakan peluang bagi sektor ini. Peluang tersebut harus segera direspon dengan berbagai kebijakan kondusif sehingga terdapat sinergi antara perkembangan sistem pembiayaan syariah dengan usaha di sektor tersebut.

Beberapa langkah kebijakan operasional yang diperlukan adalah (1) membedah konsep teoritis ke dalam konsep aplikatif sehingga mudah diimplementasikan, (2) memantapkan upaya sosialisasi pembiayaan syariah ke masyarakat petani dan pejabat publik yang menangani sektor pertanian. (3) meningkatkan pemahaman SDM baik tingkat pelaku usaha, pelaku pembiayaan syariah, maupun *policy maker* terhadap prinsip pembiayaan syariah, (4) menyusun peta usaha pertanian yang layak dibiayai dengan pola syariah, (5) penentuan sasaran pembiayaan yang tepat, (6) perumusan skim yang aplikatif dengan prosedur yang sederhana, (7) menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi dan pengolahan dananya, serta (8) adanya dukungan peraturan hukum baik di tingkat daerah sebagai unit otonom maupun tingkat pusat.

## Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Arifin, Bustanul, 2004 *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- , 2005 *Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan Dan Strategi Revitalisasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ascarya, Diana Yumanita, dan Ahmad Arief, 2004, *Dominasi Pembiayaan Non-Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia: Masalah dan Alternatif Solusi*, PPSK Working Paper Series No: WP/04/02: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta.
- Ascarya, 2005 *Pemetaan Hasil Penelitian Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia. Jakarta.
- , 2007 *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru dalam Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- , 2012 *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru dalam Penelitian Kualitatif*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 17 Januari 2012 STEI Tazkia. Bogor.
- Ashari dan Saptana, 2005. *Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*. Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 23 No.2. 132-147.
- Ashari. 2009. *Roles of National Banking in Agricultural Finance in Indonesia*. Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 27 No.1. 13-27
- Bank Indonesia, 2012, *Laporan Statistik Perbankan Syariah Desember 2012*. Jakarta: Bank Indonesia, Jakarta.
- , 2013. *Laporan Statistik Perbankan Syariah Januari 2013*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hilman, Ir. Imam. dkk. 2003. *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing Nurmanaf, AR. dkk. 2006. *Analisis Sistem Pembiayaan Mikro dalam Mendukung Usaha Pertanian di Pedesaan*. Seminar Hasil Penelitian: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

- Ismal, Rifki, Peningkatan Equity Financing untuk Memperkuat Peran Bank Syariah, <http://www.pkesinteraktif.com> diupload Rabu, 23 April 2008 03:07, diakses 7 Februari 2013.
- Karim, Adiwarmanto. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mançka, Dr. Anila. 2012. Lending Problems of Agriculture and Agro-Industry in Albania. Ontario International Development Agency. OIDA ISSN 1923-6654. International Journal Of Sustainable Development 03:04.
- Mastur, Akhmad Amien. 2006. Penataan Kelembagaan dan Permodalan bagi Pengembangan Industri Berbasis Pertanian. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Inovatif Pascapanen untuk Pengembangan Industri Berbasis Pertanian. 36-41.
- Pasaribu, Sahat. dkk. 2007. Analisis Kebijakan Pembiayaan Sektor Pertanian. Seminar Hasil Penelitian: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rafinaldy N. 2006. *Memeta Potensi dan Karakteristik UMKM bagi Penumbuhan Usaha Baru*. Infokop 29.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Saaty, Thomas L. 2001. *Theory and Applications of the Analytic Network Process*, Pittsburgh: University of Pittsburg
- Saaty, Thomas L, Luis G. Vargas, 2006, *Decision Making with the Analitic Network Process: Benefits, Opportunities, Costs and Risk*, Springer, Pittsburgh.
- Wulandari, S dan Suroso, AI. 2004. Lembaga Keuangan Syariah Alternatif Strategis Memajukan Sektor Agribisnis. *Agrimedia* Volume 9, No.1, 40-53.